



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab;

c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
- (2) Salinan naskah asli Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lidia Silvana Djaman

SK No 237726 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE*)**

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, antara lain dengan Persatuan Emirat Arab.

Kerja sama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*), yang telah ditandatangani

pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, yang selanjutnya disebut Memorandum Saling Pengertian, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi muatan dalam Memorandum Saling Pengertian antara lain:

1. tujuan dibuatnya Memorandum Saling Pengertian;
2. ruang lingkup kerja sama mencakup:
 - a. saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata pada berbagai tingkatan;
 - b. pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional;
 - c. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
 - d. peningkatan kapasitas termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.
3. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul dari Memorandum Saling Pengertian;
4. Komite Bersama yang dibentuk terkait dengan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian;
5. kerahasiaan yang terkait dengan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian;
6. pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian;
7. yurisdiksi dan klaim yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian;
8. penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian;
9. ketentuan mengenai amendemen terhadap Memorandum Saling Pengertian; dan
10. ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7006



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN PERSATUAN EMIRAT ARAB
MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab selanjutnya disebut "Para Pihak";

Menegaskan bahwa hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak akan berkontribusi kepada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan kepercayaan, kesepahaman bersama dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Meningkatkan hubungan panjang yang ada diantara Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab di berbagai bidang pertahanan dan kerja sama terkait militer, berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah;

Mencatat bahwa peningkatan dan penguatan kerja sama pertahanan akan memberikan kontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua Pertahanan Nasional;

Mempertimbangkan Pernyataan Kehendak antara Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pertahanan Bilateral yang ditandatangani di Bogor, Indonesia pada 24 Juli 2019;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kedua Negara;

Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:

PASALI TUJUAN

Memorandum Saling Pengertian ini akan memberikan kerangka umum untuk peningkatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak dalam bidang kepentingan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang lingkup kerja sama Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:
 - a. Saling kunjung delegasi pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada berbagai tingkatan;
 - b. Pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional;
 - c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
 - d. Peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.
2. Untuk pelaksanaan ayat 1, Para Pihak akan menyusun pengaturan teknis terpisah untuk menjabarkan, antara lain, perincian program, atau kegiatan, ketentuan dan persyaratan, serta hal lain yang diperlukan.

PASAL 3 TITIK KONTAK

Untuk mengatur dan memfasilitasi koordinasi antara Para Pihak, titik kontak sebagai berikut:

Untuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia:

Kotak Pos/Unit : Direktorat Kerja Sama Internasional,
Kementerian Pertahanan
Nomor telepon : +6221-3828041
Nomor Faksimile : +6221-3844500
Surel : subdit.asiaditkersin@kemhan.go.id

Untuk Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab:

Kotak Pos/Unit : 111330
Nomor telepon : +97124444448
Nomor Faksimile : +97124414460
Surel : info@mod.gov.ae

**PASAL 4
PELINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pengalihan yang tidak sah atas hak kekayaan intelektual yang dialihkan, dipertukarkan, atau dihasilkan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional negara Para Pihak, serta persetujuan internasional yang Para Pihak menjadi Pihak.
2. Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan terhadap hak sah pihak ketiga, juga penimbangan bagian kepemilikan yang setara berdasarkan kontribusi Para Pihak, harus diatur terpisah melalui pengaturan tertulis oleh Para Pihak tentang bidang kerja sama khusus.

**PASAL 5
KOMITE BERSAMA**

1. Para Pihak harus membentuk Komite Bersama yang terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak. Komite Bersama akan bertindak sebagai mekanisme konsultatif yang sesuai untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dan akan mengawasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Komite Bersama akan bertemu secara rutin di kedua Negara secara bergantian atau diputuskan lain oleh Para Pihak selama pertemuan Komite ini.
2. Pertemuan Komite Bersama harus diketuai bersama oleh ketua delegasi dari masing-masing Pihak. Notula pertemuan harus direkam secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua delegasi masing-masing Pihak.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

1. Para Pihak harus menjamin bahwa informasi dan intelijen yang diperoleh sebagai hasil dari kontak bilateral akan dilindungi sesuai dengan peraturan dalam negeri yang berlaku;

2. Para Pihak tidak akan menggunakan informasi dan intelijen untuk merugikan kepentingan pihak lain; dan
3. Para Pihak berkeinginan mengatur perlindungan bersama informasi rahasia dalam pengaturan terpisah.

PASAL 7 PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung pembiayaan mereka sendiri dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing.

PASAL 8 YURISDIKSI DAN KLAIM

Dengan menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Pihak, pengaturan penentuan yurisdiksi dan penyelesaian klaim antara Para Pihak dalam kaitannya dengan kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan disusun dalam pengaturan yang terpisah.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

PASAL 10 AMENDEMENT

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamendemen dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak dan harus menjadi bagian yang integral dari Memorandum Saling Pengertian ini dan harus diberlakukan setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik.

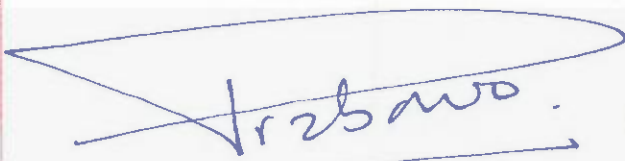
PASAL 11
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah terselesaikannya prosedur internal Negara Para Pihak.
2. Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak memengaruhi masa berlaku kegiatan yang sedang berjalan sebelum adanya pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat di Abu Dhabi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua teks sama-sama autentik. Dalam hal adanya perbedaan interpretasi dari Memorandum Saling Pengertian ini, teks bahasa Inggris yang berlaku

**UNTUK KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**



PRABOWO SUBIANTO
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA

**UNTUK KEMENTERIAN
PERTAHANAN PERSATUAN EMIRAT
ARAB**



MOHAMMED AHMED ALBWARDI
ALFALACY
MENTERI NEGARA UNTUK URUSAN
PERTAHANAN PERSATUAN EMIRAT
ARAB



REPUBLIK INDONESIA

سري

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الدفاع
لدولة الإمارات العربية المتحدة

و

وزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا

بشأن

التعاون في مجال الدفاع

سري

سري

مذكرة تفاهم
بين
وزارة الدفاع
لدولة الإمارات العربية المتحدة
و
وزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا
بشأن
التعاون في مجال الدفاع

إن وزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا، ويشار إلى كليهما فيما بعد بـ "الطرفين" أو "الطرفان"،
وإذ يؤكدان أن العلاقات الودية والتعاون بين الطرفين سيسهمان في السلام والأمن الدوليين من خلال خلق الثقة المتبادلة والتفاهم والتعاون في العلاقات الدولية،
وإذ يعززان العلاقة طويلة الأمد بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مختلف مجالات الدفاع والتعاون العسكري المرتكز على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة والسلامة الإقليمية،
وإذ يدركان أن تعزيز التعاون الدفاعي وتقويته سيسهمان في بناء علاقات ذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين،
أخذاً في الاعتبار رسالة النوايا الموقعة بين وزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا بشأن التعاون الثنائي في مجال الدفاع والموقعة في اندونيسيا بتاريخ 2019/7/24،

ووفقاً للقوانين واللوائح السائدة،

فقد توصل الطرفان إلى ما يلي:

سري

المادة (1) الغرض

توفر مذكرة التفاهم هذه إطاراً عاماً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المادة (2) نطاق التعاون

1. قد يشمل نطاق التعاون في مذكرة التفاهم هذه ما يلي:
 - أ. تبادل زيارا تالوفود بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة على مختلف المستويات.
 - ب. تبادل المعلومات والآراء في مجال التعاون الدفاعي وأية مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك تتعلق بالأمن الوطني والإقليمي والدولي؛
 - ج. التعاون في العلوم والتكنولوجيا في صناعة الدفاع؛
 - د. تعزيز بناء القدرات، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛ و
 - هـ. مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
2. لتنفيذ الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للطرفين إبرام ترتيبات منفصلة تحدد تفصيل البرامج والأنشطة، الشروط والأحكام وغيرها من المسائل ذات الصلة.

المادة (3) عناوين الاتصال

لغرض تنظيم وتسهيل التنسيق بين الطرفين، تكون عناوين الاتصال كما هو موضح أدناه:
بالنسبة لوزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة:

ص ب رقم /الوحدة: 111330

رقم الهاتف: +97124444448

رقم الفاكس: +97124414460

البريد الإلكتروني: info@mod.gov.ae

بالنسبة لوزارة الدفاع لجمهورية أندونيسيا:

ص ب رقم /الوحدة: مديرية التعاون الدولي، وزارة الدفاع

رقم الهاتف: +6221-3828041

رقم الفاكس: +6221-3844500

البريد الإلكتروني: subdit.asiaditkersin@kemhan.go.id

سري

المادة (4) حماية الملكية الفكرية

1. يحظر الطرفان الاستخدام غير المصرح به ونقل حقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المتبادلة أو المتولدة بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة في بلديهما، ووفقاً للاتفاقية الدولية التي يكون بلداهما طرفاً فيها.
2. يتم ترتيب حماية حقوق الملكية الفكرية وتوزيعها، بما في ذلك حماية الحقوق المشروعة لطرف ثالث، وكذلك النظر في جزء عادل من الملكية على أساس مساهمة الأطراف المعنية، من خلال ترتيبات مكتوبة منفصلة من قبل الطرفين بشأن مجالات محددة للتعاون.

المادة (5) اللجنة المشتركة

1. يشكل الطرفان لجنة مشتركة (يشار لها فيما بعد "باللجنة المشتركة") تتألف من ممثلين عن كل طرف، وتعمل اللجنة المشتركة على اقتراح الآليات الملائمة لتنفيذ هذه المذكرة والعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وتجتمع اللجنة المشتركة بانتظام في كل من البلدين بالتناوب أو حسب ما يقرره الطرفان خلال اجتماع هذه اللجنة.
2. يترأس اجتماع اللجنة المشتركة رؤساء اللجان عن كل طرف. يتم تدوين وقائع الاجتماعات من قبل الطرف المستقبل وتوقع من قبل رئيسي ممثلي الطرفين.

المادة (6) السرية

يضمن الطرفان حماية المعلومات والاستخبارات التي يتم الحصول عليها نتيجة الاتصالات الثنائية بما يتماشى مع الأنظمة الوطنية ذات الصلة، ويتعهد الطرفان بعدم استخدام هذه المعلومات والاستخبارات بما يضر بمصالح الطرف الآخر. ينوي الطرفان تنظيم لحملة مشتركة للمعلومات المصنفة من خلال اتفاقية منفصلة.

المادة (7) الترتيبات المالية

ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات الخاصة به في تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ووفقاً لمخصصات الميزانية.

سري

المادة (8)
الاختصاص القضائي والمطالبات

مع احترام القوانين والأنظمة الوطنية لكل طرف، يتم تنظيم تحديد الاختصاص القضائي وتسوية المطالبات بين الطرفين فيما يتعلق بأنشطة التعاون التي تنبثق من مذكرة التفاهم هذه في ترتيبات منفصلة.

المادة (9)
تسوية المنازعات

تتم تسوية أي نزاع أو اختلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بطريقة ودية من خلال التشاور أو التفاوض المتبادل بين الطرفين، ودون اللجوء إلى أي طرف ثالث.

المادة (10)
التعديلات

لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو مدة أي نشاط قبل إنهائها، ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.

المادة (11)
السريان والإنهاء

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار مكتوب من خلال القنوات الدبلوماسية بشأن اتمام الطرفين الإجراءات الوطنية اللازمة لكل طرف.

2. تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تمديدها تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها خمس (5) سنوات. يجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت، وذلك من خلال تقديم إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر (6) على الأقل من تاريخ إنهائها.

3. في حالة إنهاء هذه المذكرة وعدم تجديدها، يلتزم كل طرف بالاستمرار في تنفيذ مسؤولياته والتزاماته المؤقتة الناشئة عن الإنهاء حتى يتم الوفاء بها.

سري

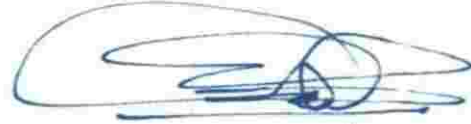
وإشهاداً على ذلك، قلم الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.

حرر رتفايو ظبي ، في هذا اليوم الاثنين من 24 فبراير 2020 باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية، ولكل منها نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير مذكرة التفاهم هذه، يسود للنص باللغة الإنجليزية.

عن/

وزارة الدفاع

لدولة الإمارات العربية المتحدة



محمد أحمد البواردي الفلاسي

وزير الدولة لشؤون الدفاع

عن/

وزارة الدفاع

لجمهورية إندونيسيا



معالي الفريق/برابو ووبهانتو

وزير الدفاع لجمهورية إندونيسيا



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates hereinafter referred to as the "Parties";

Affirming that friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations;

Enhancing the long lasting relationship between the Government of the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on various fields of defence and military-related cooperation, based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity;

Noting that the enhancing and strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both National Defences;

Considering the Letter of Intent between the Ministry of Defense of the United Arab Emirates and the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia on Bilateral Defense Cooperation signed in Bogor, Indonesia, on 24 July 2019;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries;
Have reached the following understanding:

ARTICLE 1 PURPOSE

This Memorandum of Understanding shall provide a general framework for promoting bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of mutual interest.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

1. The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding may include:
 - a. Exchange of visits of delegations between two defence and Armed Forces at various levels;
 - b. Exchange of information and views in the field of defence cooperation and on any other matters of common interest related to national, regional and international security;
 - c. Cooperation in science and technology in defence industry;
 - d. Promoting capacity building, including human resources development; and
 - e. Other areas of mutually agreed upon by the Parties.
2. For the implementation of paragraph 1, the Parties may conclude separate technical arrangement to specify, inter alia, the details of program or activity, terms and conditions and other necessary related matters.

ARTICLE 3 POINTS OF CONTACT

For the purpose of organizing and facilitating coordination between the Parties, Points of Contact shall be as shown below:

For the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia:

P.O. Box/Unit : Directorate for International Cooperation, MoD
Phone Number : +6221- 3828041
Fax Number : +6221-3844500
E-mail : subdit.asiaditkersin@kemhan.go.id

For the Ministry of Defence of the United Arab Emirates:

P.O. Box/Unit : 111330
Phone Number : +97124444448
Fax Number : +97124414460
E-mail : info@mod.gov.ae

**ARTICLE 4
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property rights transferred, exchanged or generated under this Memorandum of Understanding in accordance with respective national laws and regulations of their countries as well as the international agreement to which their countries are party.
2. The protection and distribution of intellectual property rights including protection of a third party's legitimate right, as well as the consideration of equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the Parties on the specific areas of cooperation.

**ARTICLE 5
JOINT COMMITTEE**

1. The Parties shall establish a Joint Committee composed of representatives of each Party. The Joint Committee shall serve as the appropriate consultative mechanisms for the implementation of this Memorandum of Understanding and oversee implementation of this Memorandum of Understanding. The Joint Committee shall meet regularly in both countries alternately or as decided by the Parties during the meeting of this Committee.
2. The meeting of the Joint Committee shall be co-chaired by the head of delegation of each Party. The minutes of the meeting shall be recorded in writing and signed by head of delegation of each Party.

**ARTICLE 6
CONFIDENTIALITY**

1. The Parties shall guarantee that information and intelligence obtained as a result of bilateral contacts will be protected in accordance with the pertinent domestic regulations,
2. The Parties shall undertake not to use such information and intelligence to the detriment of the other party's interest, and

3. The Parties intend to regulate the mutual protection of classified information in a separate arrangement.

ARTICLE 7 FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses in the implementation of this Memorandum of Understanding and in accordance with its budgetary allocations.

ARTICLE 8 JURISDICTION AND CLAIMS

While respecting the national laws and regulations of each Party, the arrangement of the determination of jurisdiction and settlement of claims between Parties in relation to the cooperative activities under Memorandum of Understanding (MoU) will be set out in a separate arrangement.

ARTICLE 9 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes or differences arising from the interpretation or implementation of any provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation or negotiation between the Parties without any reference to third party.

ARTICLE 10 AMENDMENTS

This Memorandum of Understanding may be amended by the mutual written consent of the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding and shall come into force on the receipt of the last written notification through diplomatic channels.

ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

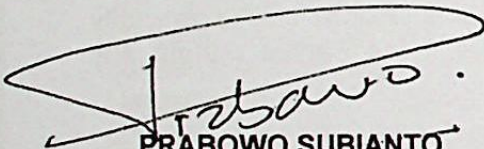
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the last written notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of proper internal states procedures.

2. This Memorandum of Understanding shall remain in valid for period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years. Either party may terminate the Memorandum of Understanding at any time by giving written notification through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its intended termination.
3. Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity or duration of any activities that were ongoing prior to the termination, unless agreed otherwise by the Parties.

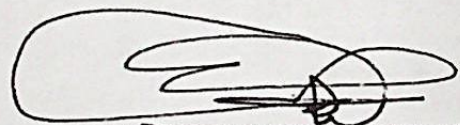
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Abu Dhabi, on this day Monday of , 24th February 2020 in the Indonesian, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

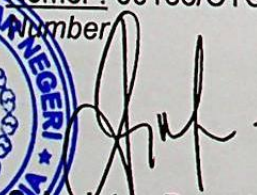

PRABOWO SUBIANTO
MINISTER OF DEFENCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF
THE UNITED ARAB EMIRATES


MOHAMMED AHMED ALBOWARDI
ALFALACY
MINISTER OF STATE FOR DEFENCE
AFFAIRS OF THE UNITED ARAB
EMIRATES

Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor : 00166/CTC/08/2022/52
Number




Shadatul Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 24 Agustus 2022
Date